

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang terjadi dalam segala aspek kehidupan telah memacu bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui proses pendidikan. Menurut Tampubolon (2002), kehidupan global amat merasuk disemua sendi kehidupan, sendi pendidikan termasuk yang cukup sensitif menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia, diharapkan mampu menyandingkan bangsa Indonesia diantara bangsa-bangsa lain. Hal ini mengingatkan bahwa pendidikan merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk dapat menyiapkan masa depan dan sanggup bersaing dengan bangsa lain.

Menurut Bappenas (2014), pencapaian MDG's tahun 2013 di Indonesia dalam bidang pendidikan khususnya pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok umur tertentu atau di dalam terminologi internasional disebut *age specific enrolment rate* (ASER), menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Tabel 1. Pencapaian MDG's Tahun 2013 di Indonesia

Jenjang Usia	Tahun	
	2000	2012
7-12	95,5%	97,9%
13-15	79,6%	89,5%

Sumber: Bappenas, 2014

Pada tahun 2012, APS usia 7-12 tahun mencapai 97,9 persen atau meningkat 2,4 persen dari keadaan tahun 2000. Dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang diperkirakan sebanyak 30,9 juta jiwa, pada tahun 2012 diperkirakan masih ada sekitar 620 ribu anak yang tidak sekolah, dari jumlah tersebut sekitar 40 persennya adalah anak usia 7-8 tahun yang belum pernah masuk sekolah dan selebihnya adalah anak usia 9-12 tahun yang umumnya putus sekolah di SD/MI. Pada jenjang usia 13-15 tahun pun mengalami peningkatan pada tahun 2012, mencapai 89,5 persen, terjadi peningkatan sebesar 9,9 persen dari tahun 2000.

Selanjutnya, untuk konteks Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2013 masih banyak siswa yang putus sekolah, tercatat ada 46 siswa SD, 24 siswa MI, 37 siswa SMP, 11 siswa MTs, 36 siswa SMA, 3 siswa MA dan 78 siswa SMK (Radar Lampung, 2014). Selain Angka Putus Sekolah, terdapat pula Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni yang digunakan sebagai alat pengukur pencapaian kinerja pendidikan. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan, lalu APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Berikut adalah data Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni siswa SD, SMP dan SMA Kota Bandar Lampung tahun 2013 berdasarkan data dari Kemendikbud.

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni siswa SD, SMP dan SMA Kota Bandar Lampung tahun 2013

Jenjang Sekolah	Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Murni
Sekolah Dasar	119,90%	99,98%
Sekolah Menengah Pertama	96,33%	77,94%
Sekolah Menengah Akhir	98,25%	75,52%

Sumber: Kemendikbud, 2013

Data di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD di Kota Bandar Lampung mencapai 119,90 persen, sementara untuk Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 99,98 persen. Pada tingkat SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 96,33 persen, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 77,94 persen. Kemudian, Pada tingkat SMA Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 98,25 persen, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 75,52 persen.

Pembangunan pendidikan mempunyai peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Menurut Marzuki (2011) pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* atau persamaan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Aspek yang kedua adalah *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Era desentralisasi-otonomi berdampak pada semakin terbukanya kebebasan yang dimiliki masyarakat untuk terlibat dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, setiap daerah berlomba-lomba untuk memajukan pendidikan. Berbagai macam program pendidikan dibuat, mulai dari sekolah gratis, beasiswa dan lain-lain. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses agar terwujudnya pemerataan pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Pendidikan merupakan suatu investasi jangka panjang yang jika pelaksanaannya tepat guna akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan tujuan di atas, salah satu usaha Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tanggung jawab dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung adalah dibentuknya suatu jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diberi nama Bina Lingkungan. Bina Lingkungan dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan secara gratis. Bina Lingkungan diperuntukkan bagi siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama sampai tingkat Perguruan Tinggi. Bina Lingkungan merupakan salah satu program unggulan Walikota Bandar Lampung, Drs. Hi. Herman HN, dalam bidang pendidikan.

Bina Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan dan memberi peluang kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat bersekolah tanpa harus merasa dibeda-

bedakan dengan peserta didik lain yang berasal dari status ekonomi yang lebih tinggi. Bina Lingkungan juga bertujuan untuk menekan jumlah anak yang tidak bersekolah sekaligus mengurangi angka putus sekolah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Pasal 2 Poin (a) yang berbunyi:

“Memberikan kesempatan kepada warga Negara Republik Indonesia, khususnya anak-anak usia sekolah masyarakat Kota Bandar Lampung untuk memperoleh tempat layanan pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan yang lebih tinggi”.

Kemudian pada pasal 3 Poin (d) yang berbunyi:

“Tidak diskriminatif, artinya proses penerimaan peserta didik baru ini dapat diikuti oleh segenap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi syarat, tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan, serta status sosial”.

Program Bina Lingkungan diberikan Pemerintah Kota dengan kapasitas 50 persen masuk sekolah tanpa tes dengan sasaran kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat menempuh pendidikan dikarenakan tak memiliki biaya. Apabila pendaftar melampaui kuota 50 persen maka pendaftar akan direkomendasikan ke sekolah di Kecamatan terdekat jika daya tampung memungkinkan. Para peserta program Bina Lingkungan ini pun diberi perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu dan tas.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui program pendidikan Bina Lingkungan ini memiliki visi agar semua masyarakat yang kurang mampu dapat bersekolah, jadi tak ada alasan untuk tidak bersekolah dikarenakan tidak memiliki biaya. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang layak pula (Ciputra News, 2014).

Gambaran tentang program serupa di beberapa wilayah Indonesia juga banyak ditemui. Program tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai program unggulan, hal ini dirasa penting guna meningkatkan mutu pendidikan di wilayah daerah tersebut. Seperti di Kota Semarang, Jawa Tengah, terdapat program pendidikan yang bernama Gerdu Kempling (Mbani, Santoso, dan Taufiq, 2014). Program ini berupa pelatihan dan bantuan pendidikan dasar seperti: BOS, BSM, dan Beasiswa CSR. Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terdapat program pendidikan yang diberi nama Program Sekolah Gratis (Marzuki, 2011). Program ini merupakan upaya Pemerintah untuk memperluas akses pemerataan pendidikan dan meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, terdapat program pendidikan bernama PRODIRA (Program Pendidikan untuk Rakyat). Program ini bertujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta membebaskan segala macam pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta dari biaya operasional satuan pendidikan, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (Balihristi, 2012).

Gambaran ketiga program di atas menunjukkan bahwa strategi yang digulirkan pemerintah daerah di bidang pendidikan, berusaha untuk mengkomodir keterlibatan masyarakat secara luas. Namun demikian, ketiga program di atas hanya menyoroti keterlibatan masyarakat secara umum, pada

tataran ini menarik untuk dilakukan penelusuran terkait keterlibatan masyarakat nelayan dalam program pemanfaatan perluasan akses di bidang pendidikan.

Seperti diketahui, wilayah Kota Bandar Lampung memiliki area pesisir yang merupakan bagian dari Teluk Lampung, mulai dari Kecamatan Teluk Betung Timur sampai dengan Kecamatan Panjang. Pada area pesisir tersebut terdapat banyak perkampungan nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat *urban* dan dalam proses pembangunan selalu menjadi perhatian, karena kawasan pemukiman masyarakat nelayan dianggap sebagai kantong-kantong kemiskinan. Salah satu Kelurahan yang terdapat di kawasan Teluk Lampung adalah Kelurahan Kota Karang Raya yang merupakan bagian dari Kecamatan Teluk Betung Timur. Kelurahan Kota Karang Raya sendiri merupakan pemekaran dari kelurahan Kota Karang. Masyarakat Kelurahan Kota Karang Raya sebagian besar bermatapencarian sebagai nelayan dan kebanyakan dari mereka merupakan masyarakat pendatang dari luar Provinsi Lampung yang sudah lama menetap di wilayah tersebut. Perkampungan nelayan yang terdapat di Kelurahan Kota Karang Raya ini cukup luas dan berpenduduk padat, jika diperhatikan secara kondisi, perkampungan ini sangat memprihatinkan, rumah yang satu dengan yang lain saling berhimpitan, sampah dimana-mana, tempat mck (mandi, cuci, dan kakus) yang tak layak, sehingga kesan kumuh yang melekat pada perkampungan nelayan sangat nampak jelas.

Matapencarian nelayan bisa dikatakan sebagai sesuatu pekerjaan yang turun-temurun. Sebagai nelayan, penghasilan yang didapatkan tidaklah tetap,

bisa dikatakan rezeki yang didapatkan *nasib-nasiban* karena nelayan mengandalkan hasil alam serta kondisi alam, seperti: cuaca, angin, dan keadaan bulan, purnama atau tidak. Fasilitas dan peralatan nelayan yang masih tradisional pun mempengaruhi penghasilan para nelayan di Kelurahan Kota Karang Raya. Tidak menentunya penghasilan yang didapatkan oleh nelayan-nelayan ini berdampak pada kesejahteraan keluarga, salah satunya berdampak pada pendidikan anak.

Penghasilan nelayan di Kelurahan Kota Karang Raya yang tidak menentu dan hutang-hutang yang melilit membuat mereka terkendala dalam memenuhi pendidikan anaknya, ditambah lagi pendidikan yang semakin lama semakin mahal. Tak jarang anak harus putus sekolah di tengah jalan dan tidak dapat melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelusuran terkait jalannya program Bina Lingkungan di Kelurahan Kota Karang Raya, seperti diketahui bahwa terdapat banyak problematika pada masyarakat nelayan Kelurahan Kota Karang Raya khususnya dibidang pendidikan, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat nelayan Kota Karang Raya tergolong masih rendah, serta ditambah kondisi ekonomi yang lemah membuat masyarakat nelayan Kelurahan Kota Karang Raya terkendala dalam memenuhi pendidikan anak.

B. Rumusan Masalah

Bina lingkungan merupakan salah satu program pendidikan unggulan Walikota Bandar Lampung, Drs. Hi. Herman HN, Bina Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan dan memberi peluang kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat

bersekolah. Pada kasus ini, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut perihal keterlibatan masyarakat nelayan di kawasan pesisir Bandar Lampung khususnya di Kelurahan Kota Karang Raya dalam program Bina Lingkungan. Mengingat bahwa di Kelurahan Kota Karang Raya banyak masyarakatnya yang bermatapencarian sebagai nelayan dan buruh nelayan yang berpenghasilan rendah serta tidak menentu, sehingga terkendala dalam memenuhi pendidikan anaknya.

Terkait dengan hal tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitian ini yakni “Bagaimana efektivitas program pendidikan Bina Lingkungan pada masyarakat nelayan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menjelaskan efektivitas program pendidikan Bina Lingkungan pada masyarakat nelayan Kelurahan Kota Karang Raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Sumbangan pemikiran bagi para ahli maupun akademisi lain yang mengkaji masalah efektivitas program khususnya dibidang pendidikan.

2. Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan evaluasi bagi *stakeholders* terkait, khususnya program bidang pendidikan.